

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Kasus Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat)**



Skripsi Oleh:

ARYA JATMIKA

01111003083

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2018

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA TIGA DINAS DI KABUPATEN LAHAT)

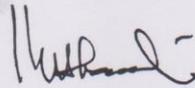
Disusun oleh :

Nama : Arya Jatmika
NIM : 01111003083
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan : Dosen Pembimbing

Tanggal 6 Juli 2018 : Ketua



Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak.
NIP. 195808281988101001

Tanggal 30 April 2018

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196905251996032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA TIGA DINAS DI KABUPATEN LAHAT)**

Disusun oleh :

Nama : Arya Jatmika
NIM : 01111003083
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

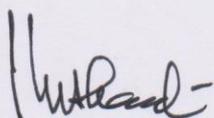
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 23 Juli 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 23 Juli 2018

Ketua

Anggota

Anggota



Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA
195808281988101001



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Jatmika
NIM : 01111003083
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA TIGA DINAS DI KABUPATEN LAHAT).**

Pembimbing :

Ketua : Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak.

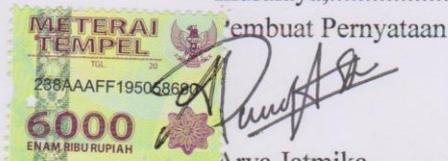
Anggota : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak.

Tanggal Ujian : 23 Juli 2018

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila Saya tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 24 Juli 2018



Arya Jatmika
01111003083

KATA PENGANTAR

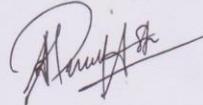
Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA. Dosen pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak. Dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak. Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi.

Indralaya, 29 Juli 2018



Arya Jatmika

01111003083

**TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA TIGA DINAS DI KABUPATEN LAHAT)**

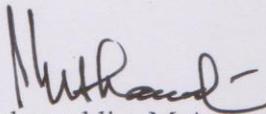
**Oleh :
Arya Jatmika**

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di tiga dinas Kabupaten Lahat. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban responden dari kuisisioner yang disebar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Melalui uji t diketahui nilai t hitung sebesar 1,830 menunjukkan penerapan sistem akuntansi pada dinas Kabupaten Lahat mempunyai pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Nilai t hitung sebesar 2,384 menunjukkan kualitas aparatur pemerintah daerah pada dinas Kabupaten Lahat mempunyai pengaruh positif terhadap laporan keuangan. Dengan hasil nilai koefisien determinasi sebesar 0,265, hal ini berarti bahwa 26,5% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah.

***Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Kualitas Aparatur,
Kualitas Laporan Keuangan.***

Ketua



Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA
NIP. 195808281988101001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

**INFLUENCE THE QUALITY OF FINANCIAL REPORT OF DISTRICT
GOVERNMENT (ESPECIALLY IN THREE SUBDISTRICT LAHAT)**

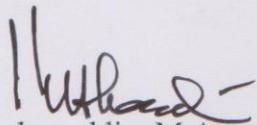
**By :
Arya Jatmika**

This research is held to find out how far finance accounting system and quality of district government member influence the quality of financial report district government especially in three subdistrict Lahat. The method used quantitative method. Data types which is used in this research is primary data which is collected from the answer of respondents to the questionnaires which are given before.

The result of this research show that government financial accounting system and the quality of district government members influence the quality of government financial report. By using t test, the t value is 1.830, this result shows that accounting system implementation in the sub district government Lahat give positive impact the government accounting report. The t value is 2.384 this result shows the quality of the subdistrict Lahat members also give a positive impact to government financial report. The value of the determinant coefficient is 0,265 which shows that the regression model which has been built is able to explain 26,5% variability of the quality financial report.

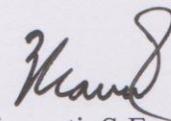
Keywords : financial accounting system, quality of members, the quality government financial report.

Ketua



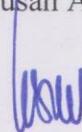
Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA
NIP. 195808281988101001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : Arya Jatmika

NIM : 01111003083

Jurusan : Akuntansi

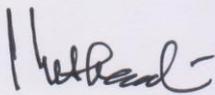
Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 24 Juli..... 2018

Pembimbing Skripsi :

Ketua



Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA
NIP. 195808281988101001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Arya Jatmika

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 Oktober 1993

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Alamat Rumah (Orang Tua) : Jl. Kauman No. 117, Kelurahan Pagar Agung
RT/RW : 001/001, Kecamatan Lahat,
Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Pendidikan Formal :

SD : SD Negeri 03 Lahat

SMP : SMP Negeri 1 Lahat

SMA : SMA Negeri 4 Lahat

No. Hp : 0857-8844-4042

Pengalaman Organisasi :

- Kepala Divisi Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi
- Departemen Dana dan Usaha Ikatan Mahasiswa Lahat (IKAMALA)
- Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Lahat (IKAMALA)
- Dewan Pembina Ikatan Mahasiswa Lahat (IKAMALA)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Teori	13
2.2. Tinjauan Pustaka	14
2.2.1. Sistem Akuntansi	14
2.2.1.1. Sistem Akuntansi Pemerintahan	15
2.2.1.2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan	16
2.2.2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	17
2.2.2.1. Sistem Pencatatan	18
2.2.2.2. Prosedur Pencatatan	18
2.2.2.3. Sistem Pengakuan	20

2.2.3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	22
2.2.4. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	23
2.2.4.1. Pengertian Kualitas	23
2.2.4.2. Pengertian Aparatur Pemerintah Daerah	23
2.2.5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.2.5.1. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.2.6. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	26
2.2.7. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.3. Penelitian Terdahulu	29
2.4. Kerangka Pemikiran	33
2.5. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2. Rancangan Penelitian	37
3.3. Jenis dan Sumber Data	38
3.4. Metode Penentuan Responden	39
3.5. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	39
3.6. Teknik Analisis Data	41
3.6.1. Analisis Kuantitatif	41
3.6.2. Analisis Kualitatif	41
3.6.3. Uji Kualitas Data	42
3.6.3.1. Uji Reliabilitas	42
3.6.3.2. Uji Validitas	42
3.6.4. Uji Asumsi Klasik	43
3.6.4.1. Uji Normalitas	43
3.6.4.2. Uji Heteroskedestisitas	43
3.6.4.3. Uji Multikolinearitas	44
3.6.4.4. Uji Autokorelasi	44
3.6.5. Pengujian Hipotesis	45
3.6.5.1. Uji Parsial	45

4.2.5. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Di Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	95

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kelompok Responden Dinas Kabupaten Lahat Berdasarkan Masa Bekerja	47
Tabel 4.2. Kelompok Responden Dinas Kabupaten Lahat Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.3. Kelompok Responden Dinas Kabupaten Lahat Berdasarkan Jenjang Usia.....	47
Tabel 4.4. Gambaran Mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	49
Tabel 4.5. Gambaran Mengenai Prosedur Pencatatan Akuntansi Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum	51
Tabel 4.6. Gambaran Mengenai Pembuatan Laporan Keuangan Yang Dilaporkan Secara Periodik	54
Tabel 4.7. Gambaran Mengenai Pengetahuan Staf Bagian Keuangan Dalam Bidang Akuntansi	57
Tabel 4.8. Gambaran Mengenai Pelatihan Penunjang Kompetensi Pada Bidang Akuntansi	60
Tabel 4.9. Gambaran Mengenai Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan Dan Dapat Dipahami	64
Tabel 4.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Daftar Pertanyaan Variabel Sistem Akuntansi Pemerintah	70
Tabel 4.11. Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Daftar Pertanyaan Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah	71
Tabel 4.12. Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Daftar Pertanyaan Variabel Kualitas Laporan Keuangan	72
Tabel 4.13. Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	73
Tabel 4.14. Validitas Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	74

Tabel 4.15. Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	75
Tabel 4.16. Reliabilitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	76
Tabel 4.17. Reliabilitas Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	76
Tabel 4.18. Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	77
Tabel 4.19. Uji Normalitas Dan Model Regresi	78
Tabel 4.20. Hasil Uji Multikolinearitas	79
Tabel 4.21. Hasil Uji Autokorelasi	80
Tabel 4.22. Hasil Uji Koefisien Determinasi	82
Tabel 4.23. Hasil Uji Statistik	83
Tabel 4.24. Hasil Pengujian Regresi Linear	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Garis Kontinum Mengenai Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	50
Gambar 4.2. Garis Kontinum Mengenai Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum.....	53
Gambar 4.3. Garis Kontinum Mengenai Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik	56
Gambar 4.4. Garis Kontinum Mengenai Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil Dalam Bidang Akuntansi	59
Gambar 4.5. Garis Kontinum Mengenai Pelatihan Penunjang Kompetensi Dalam Bidang Akuntansi	62
Gambar 4.6. Garis Kontinum Mengenai Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan Dan Dapat Dipahami	68
Gambar 4.7. Uji Heteroskedastisitas – Scatterplot	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas (Roviyantie, 2011). Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, skedul dan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan laporan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dengan demikian laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sistem Akuntansi merupakan salah satu hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Sistem Akuntansi Pemerintah pada pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Ditingkat pemerintah daerah sistem akuntansi pemerintahan diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Kualitas laporan keuangan akan terlihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. Auditor (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* melalui laporan keuangan.

Setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas. Artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan.

Laporan Keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia berupa tenaga staf keuangan yang kompeten, mampu melaksanakan proses pencatatan akuntansi dan mampu menyusun sesuai format yang berlaku untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga dengan entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas merupakan bukti untuk perbaikan dalam bidang penyajian laporan keuangan. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah belum seperti yang diharapkan dengan adanya otonomi daerah. Selain itu, tuntutan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah khususnya pada kualitas laporan keuangan perlu dilakukan. Adanya fakta bahwa masih buruknya hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lahat yang dapat terlihat dengan adanya opini perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Perkembangan opini BPK atas LKPD Kabupaten Lahat tahun 2009 yang mendapat opini WDP. Selanjutnya untuk tahun 2010 LKPD Kabupaten Lahat masih mendapat opini WDP. Sedangkan pada tahun 2011 LKPD Kabupaten Lahat belum mengalami peningkatan dengan masih diraihnya opini WDP.

Demikian halnya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 dan 2013 LKPD Kabupaten Lahat masih meraih opini WDP sehingga telah 5 tahun berturut-turut Kabupaten Lahat mendapatkan opini WDP dari hasil audit BPK. Namun tidak demikian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014, 2015, 2016 LKPD Kabupaten Lahat berhasil meraih opini WTP dari hasil audit BPK sehingga ini menjadi sebuah prestasi bagus bagi pemerintah Kabupaten Lahat. Namun walaupun Pemerintah Kabupaten Lahat telah mendapat opini WTP dari hasil audit BPK, Ketua LSM Plantari, Sanderson Syafe'i mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2016. Dimana setidaknya, ada tujuh temuan penting Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) yang menggambarkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Pemkab. Lahat, sebagaimana dicatat oleh Plantari:

- 1. Pengelolaan pajak, retribusi, piutang pajak dan piutang retribusi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak tertib.*
- 2. Pengelolaan pajak reklame dan retribusi izin mendirikan bangunan konstruksi reklame tidak tertib.*
- 3. Serah terima aset dari Pemkab Lahat kepada Pemkab Empat Lawang belum selesai.*
- 4. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan piutang PBB-P2 tidak tertib.*
- 5. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebesar Rp.17.326.821.659,70.*
- 6. Penyerahan kewenangan personil, prasarana/sarana dan dokumen/P2D antara Pemkab Lahat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) belum selesai.*
- 7. Realisasi belanja listrik pada Sekretariat Daerah (Setda) untuk PDAM Tirta Lematang tidak tepat sebesar Rp.1.118.420.485,00. (LCS-1)*

Ini menunjukkan bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DPPKAD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merupakan tiga dinas yang menjadi sorotan dari pemeriksaan BPK, karena penggunaan dana yang ada di dinas ini dinilai relatif dalam jumlah yang besar sehingga laporan keuangan pada DPPKAD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dijadikan sampel pemeriksaan oleh BPK untuk menilai

kualitas laporan keuangan daerah. Masalah utama yang ditemukan oleh BPK adalah mengenai penemuan terkait realisasi pembayaran jasa dan aset yang tidak sesuai dengan realisasi fisik serta pengelolaan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pelaporan akibat dari sistem akuntansi keuangan dan sumber daya manusia terkait laporan keuangan yang masih lemah sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Walaupun telah diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan tetapi dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- 1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern*
- 2. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib*
- 3. Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku*
- 4. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP*
- 5. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan*
- 6. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.*

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan berupa andal yang bebas dari kesalahan dan ditinjau dari kreatifitas staf pelaksananya. Dalam penelitiannya, Rusmanto (2013) menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan penting karena akan berpengaruh terhadap penggunaannya dalam mengambil keputusan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh A. Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, dan Hasriani (2015). Penelitian tersebut mengatakan adanya hubungan dan pengaruh positif antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 25,6 %. Dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Patra dkk., adalah karyawan di Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu. Objek penelitian ini adalah Staf bagian keuangan pada DPPKAD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Perbedaan lain dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti memberikan penambahan pada variabel independen berupa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan SDM yang berkompeten. Kesiapan SDM pada ketiga dinas yang menjadi sorotan BPK ini pada umumnya kurang memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yaitu kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Alasan lain menambahkan variabel ini adalah tingkat jenjang pendidikan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kabupaten Lahat dinilai belum memenuhi standar yang baik, mulai dari banyaknya sumber daya manusia yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas dan Minimnya sumber daya manusia yang professional dibidangnya. Kita ketahui bersama untuk menciptakan laporan keuangan yang baik harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan profesional dibidang tersebut. Jika hal ini terwujud artinya pemerintah daerah telah ikut andil dalam mensukseskan agenda salah satu dari reformasi yaitu menciptakan pemerintahan yang baik. Pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan.

*Berdasarkan uraian di atas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada penulis ingin meneliti lebih jauh tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat)”**.*

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat?

1.3. Tujuan penelitian

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Menghitung seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat dengan indikator kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya dan laporan keuangan dilaporkan secara periodik.
2. Menghitung seberapa besar Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dengan indikator pengetahuan Staf Bagian Keuangan dalam bidang akuntansi dan keaktifan Staf Bagian Keuangan dalam mengikuti pelatihan penunjang kompetensi bidang akuntansi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penulisan berikutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah dan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Tiga Dinas Di Kabupaten Lahat.

2. Secara Praktis

- a. Pihak Pemerintah

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kualitas laporan keuangan pada tiga dinas di pemerintah daerah kabupaten untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pihak Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

3. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai landasan teori dan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, responden, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, serta teknik analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang profil responden, hasil penelitian dan pembahasan variabel yang diteliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ni Made Rika Krisna. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan
- Juwita, Rukmini. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Trikomika*. Vol. 12 No. 2
- Kartika, Daniel dan Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 5 No. 3. Edisi Oktober 2013
- Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). *E-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol. 2 No. 1
- Patra, A. Dahri Adi., Dkk. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, ISSN 2339-1502. Vol. 02 No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 59/PMK/2005) mengenai *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Pustaka Yudistira
- Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang *Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah*
- Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*
- Subaweh, Imam. 2010. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 13 No. 1

Susanti. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-undang No. 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Yuliani, Safrida, et., 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 1